



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

	Yang mengajukan																						
	a. Nama Kepala Sekolah	: 5	A	1	D	1	N	П	5	1.	P	d			T		Г	T			Г		1
			1								-						-				-		3
	Identitas Sekolah																						
	a. Nama Sekolah	: 5	M	K		S	u	0	A	5	(A		M	A		1	A	M	B	1		
	b. Alamat	: 3	N		K	Ŧ	B	0	N		D	u	R	E	N		R	T		0	3.		
			0	1																			
	c. Jenjang Sekolah	:	TK/RA				SC	/MI			SM	P/M	Ts	SMA/MA/SMK						SLE	3		
	d. Status Sekolah	:[Negeri			V	Sw	asta															
	e. Propinsi	: 5	A	M	B	1																	1
	f. Kabupaten/Kota	: M	u	A	R	0		J	A	M	B	1											
	g. Kecamatan	: 5	u	N	B	A	1		G	€	L	A	M										
	h. Kelurahan	: 4	A	N	G	K	1	T															
	i. Email	: 5	n	d	n	8	i	a	3	a	m	6	i	t	2	3	0	7	a	n	0	0	1.0
	i. Email Legalitas Sekolah	: 8	n	d	n	8	i	a	3	a	m	6	i	1	2	3	0	7	a	h	0	0].
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A H U 0 0 1 5 4 0 3 A H 0 1 0 4 7 201												70											
b. Tanggal : 19 10 2019																							
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : L 4 1 4 1 0 1 / 0 1 / D P M - PT SP																							
	d. Tanggal			: 0	8	71	0		1	2/0	51:			1,		1							
											//	A	P	EN									
	ST JAMBIY S MAKET													-	-	-							

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,

2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.

4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.

5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id

6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. R.M. Noor Admadibrata No. 5 Telanaipura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455 Jambi 36122 Website: www.dpmptsp.jambiprov.go.id
Email: dpmptspprovjambi66@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

NOMOR: 1414101/ 01 /DPM-PTSP/IZIN OPERASIONAL-SMK/I/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK SUDASIA MUARO JAMBI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sudasia Muaro Jambi merupakan salah satu sarana pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajad pendidikan masyarakat yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diberikan Izin Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran negera Republik Indonesia Nomor 5670);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 2).

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Karya Bhakti Manusia Nomor : 012/22/YKBM/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor S-16/DISDIK-3.1/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 perihal Pertimbangan Teknis Persetujuan Izin Operasional SMK SUDASIA MUARO JAMBI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Yayasan : YAYASAN KARYA BHAKTI MANUSIA

2. NIB : 0220105280254

3. NPWP : 93.902.699.3-335.000

4. Nama Sekolah : SMK SUDASIA MUARO JAMBI

5. Kode KBLI : 85240

6. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Kejuruan / Madrasah

Aliyah Kejuruan Sawasta.

7. Lokasi Usaha : Jalan Kebon Duren RT.03/01 Desa

Tangkit Kec. Sungai Gelam Kabupaten

Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

KEDUA

Izin Operasional SMK Sudasia Muaro Jambi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkan dan untuk pelaksanaan pengendalian pengawasan dan pembinaan selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

KETIGA

Memberi kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan meubeler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi serta penerimaan siswa baru.

KEEMPAT

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini harus mematuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEENAM

Dalam melaksanakan kegiatan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, pemerintah daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 8 Januari 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Permbina Utama Muda / NIP.19710510 199703 1 008

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi di Jambi.
- 2. Walikota Jambi di Jambi.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455 Jambi 36122 Website: www.dpmptsp.jambiprov.go.id

Email: dpmptspproviambi66@gmail.com

Jambi, 8 Januari 2021

Kepada.

Nomor Sifat

: S-1414101/ 39 /DPM-PTSP-5/I/2021

Yth. Sdr. Ketua Yayasan KARYA BHAKTI

Lampiran

Hal

: Biasa : --

Persetujuan Izin Pendirian Satuan

di-

2 100

MANUSIA

Pendidikan SMK SUDASIA MUARO JAMBI.

Jambi

Surat permohonan Yayasan Karya Bhakti Manusia Nomor : 012/22/YKBM-JBI/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018.

 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi.

4. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor S-16/DISDIK 3.1/

I/2021 tanggal 5 Januari 2021.

Setelah mempelajari pertimbangan teknis, dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen yang disampaikan, bahwa permohonan tersebut *dapat diberikan persetujuan* kepada :

a. Nama Perusahaan

: YAYASAN KARYA BHAKTI MANUSIA

b. NIB c. NPWP : 0220105280254 : 93.902.699.3-335,000

d. Nama Sekolah

SMK SUDASIA MUARO JAMBI

e. Kode KBLI

85240

f. Nama KBLI

Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

: Swasta

g. Nama Pimpinan

Drs. Dahlimi, M.Pd

h. Lokasi Usaha

Jalan Kebon Duren RT. 03/01, Desa Tangkit, Kec. Sungai Gelam

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Kepala Sekolah berwenang menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan meubeler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi serta penerimaan siswa baru, dan mematuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas

Pendidikan Provinsi Jambi;

3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan Pemerintah Daerah mengambil

tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan melalui Aplikasi Online Single Submussion (OSS) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Demikian surat persetujuan ini di tetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELEYANAN TERPADU

MRUN ROSYADI.S.Sos.M.S.

NIP.197 10510 199703 1 008

Pembina Utama Muda

Tembusan:

1. Gubernur Jambi di Jambi.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.

Catatan: Dokumen ini dibuat atas dasar data dari Pelaku Usaha dan Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis.

Kebenaran dan Keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0015403.AH.01.04.Tahun 2019 TENTANG **PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**

YAYASAN KARYA BHAKTI MANUSIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohunan Notaris SYAHRIT TANZIL, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris SYAHRIT TANZIL, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARYA BHAKTI MANUSIA tanggal 19 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019101915101257 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARYA BHAKTI MANUSIA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN KARYA BHAKTI MANUSIA

berkedudukan di KOTA JAMBI sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat cleh Notaris SYAHRIT TANZIL, SH berkedudukan di KOTA JAMBI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2019.

a.n. Pit. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2019 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020559.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 19 Oktober 2019